



# **INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PALARAN Tahun 2024**



NOMOR : 0041/0084/400.02  
TANGGAL : 10 JANUARI 2024





# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KANTOR KECAMATAN PALARAN

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur

---

**SURAT KEPUTUSAN  
CAMAT PALARAN  
Nomor : 050/0797/400.02**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN PALARAN TAHUN 2024**

**CAMAT PALARAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, Menetapkan Indikator Kinerja Utama;
  - b. Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - c. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Walikota Samarinda Nomor 050/1345/300.01 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
  - d. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c tersebut, perlu menetapkan Keputusan Camat perihal Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Palaran.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- h. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- j. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
- m. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
- n. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kantor Kecamatan Palaran Tahun 2024

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang dikerjakan oleh Kecamatan Samarinda Kota untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) serta

melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam dictum disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Samarinda.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 10 Januari 2024



Camat Palaran

Jamal Yanto, S.Sos., M.Si.

Pembina/IVa  
NIP. 196909201991121001

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
3. Inspektorat Daerah Kota Samarinda

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke khadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Palaran Tahun 2024. Dokumen IKU ini digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan yang akan dicapai serta tingkat kinerja Kecamatan Palaran.

Indikator Kinerja Utama ini disusun sejalan dengan tujuan dan sasaran dari pembangunan Kecamatan Palaran. Penyusunan Indikator Kinerja ini tidak terlepas dari Renstra yang telah disusun dan juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda Tahun 2021-2026 serta Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Palaran.

Kami berharap dengan disusunnya Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Palaran bisa memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan SAKIP Kecamatan palaran Tahun 2024.

Samarinda, 10 Januari 2024



Camat Palaran

**Jamal Yanto, S.Sos., M.Si.**

NIP. 196609201991121001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Dasar Hukum .....	2
BAB II Pengertian Indikator Kinerja	
2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama .....	5
2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja .....	5
2.3. Jenis-jenis Indikator Kinerja .....	6
BAB III Gambaran Umum	
3.1. Visi dan Misi .....	7
3.2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	9
3.3. Tujuan dan Sasaran .....	10
3.4. Indikator Kinerja Kecamatan Palaran .....	13
BAB IV Penutup .....	15

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Dasar Hukum .....	3
<b>BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA</b>	
2.1. Definisi Indikator Kinerja .....	6
2.2. Syarat Kinerja Indikator Kinerja .....	6
2.3. Jenis-Jenis Indikator Kinerja Utama .....	7
<b>BAB III GAMBARAN UMUM</b>	
3.1. Visi dan Misi .....	8
3.2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	10
3.3. Tujuan dan Sasaran .....	11
3.4. Indikator Kinerja Kecamatan Palaran .....	14
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>16</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Palaran	13
Tabel 3.2.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2024 .....	13
Tabel 3.3.	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palaran Tahun 2024 .....	15

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah merupakan ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga Indikator Kinerja Kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun system manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan birorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kecamatan Palaran dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicator (KPI) adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas

### **Maksud Indikator Kinerja Utama (IKU):**

- **Alat Ukur Kinerja:**  
IKU berfungsi sebagai alat untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi atau individu telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- **Pencapaian Tujuan:**  
IKU memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.
- **Manajemen Kinerja:**  
IKU memberikan informasi kinerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan manajemen kinerja secara efektif dan efisien.
- **Peningkatan Akuntabilitas:**  
IKU membantu meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memberikan ukuran keberhasilan yang jelas dan terukur.

### **Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU):**

- **Meningkatkan Kinerja:**  
IKU bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi atau individu dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

- **Meningkatkan Akuntabilitas:**  
IKU bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memberikan ukuran keberhasilan yang jelas dan terukur.
- **Meningkatkan Efektivitas:**  
IKU membantu organisasi atau individu untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membuat keputusan yang lebih efektif.
- **Meningkatkan Efisiensi:**  
IKU membantu organisasi atau individu untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dan mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan.
- **Mendukung Perencanaan Strategis:**  
IKU membantu organisasi dalam merumuskan dan mengevaluasi perencanaan strategis, serta memastikan bahwa kegiatan dan program yang dilakukan selaras dengan tujuan organisasi.
- **Mendukung Pengambilan Keputusan:**  
IKU memberikan informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

### 1.3. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kecamatan Palaran adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.
16. Surat Edaran dari Sekretariat Daerah Kota Samarinda Nomor 000.8.6.3/1021/013.02 Tentang Pedoman Teknis Pengukuran Dan Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

## BAB II

### PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

#### 2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator Keluaran (out put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

#### 1.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin ( keberhasilan / kegagalan) yang akan diukur.

## 5 Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

### 1.3. Jenis-Jenis Indikator Kinerja Utama

Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu :

1. Indikator Input :  
Gambaran mengenai sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome ( kuantitas, kualitas dan kehematan ).
2. Indikator process :  
Gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang dan jasa ( frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal dan ketaatan terhadap ketentuan/standart).
3. Indikator Output :  
Gambaran mengenai output dalam bentuk barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas dan efisiensi).
4. Indikator Outcome :  
Gambaran mengenai hasil actual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang dihasilkan (Peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektifitas dan peningkatan pendapatan).
5. Indikator Dampak :  
Gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator Dampak adalah indikator outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.

**BAB III****GAMBARAN UMUM****3.1. Visi dan Misi**

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan.

Visi Kota Samarinda telah dirumuskan dalam RENSTRA Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026 adalah :

**"TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"**

Makna dari Visi tersebut adalah Kota pusat peradaban yang menciptakan tatanan politik, ekonomi, dan masyarakat yang harmonis, dan toleran menuju masyarakat madani. MADANI sebagai akronim dari kata maju, berbudaya dan harmoni dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Sebuah kota Maju yang ekonomi daerah mandiri ditandai dengan berkembangnya sector ekonomi rakyat yang produktif dan kreatif didukung infrastruktur modern, dengan tata ruang yang aman dan nyaman
2. Samarinda sebagai kota Sungai (the spirit or river city) yang berbudaya, ditandai dengan warga sipil dan aparat yang sehat, cerdas dan religius

yang menjunjung tinggi etika, moralitas dan kejujuran dalam semangat persatuan dan kegotongroyongan yang tinggi.

3. Kota yang selalu menjaga hubungan harmoni antar warga dan warga dengan lingkungan dalam suatu system kemasyarakatan dan lingkungan kota yang asri dan lestari.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi (instansi pemerintah) sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi dan Visi akan mendorong alokasi sumber daya di seluruh organisasi, sehingga kedua ungkapan tersebut harus selaras dengan tugas, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi yang harus dilaksanakan oleh kecamatan adalah Misi 3 dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan yaitu :

**“MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BEBAS KORUPSI”**

Dengan pernyataan misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Kecamatan Palaran dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam.

Makna dari Misi tersebut adalah :

1. Profesional, meningkatkan kemampuan penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan dengan ramah, mudah, cepat dan tepat waktu dengan menerapkan etika pelayanan publik.
2. Transparan, bersifat terbuka, melalui penyediaan informasi yang mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
3. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bebas Korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang atau kepercayaan yang diamanahkan untuk kepentingan pribadi dan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

### 3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 Tanggal 22 September 2014 Tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, organisasi Kecamatan adalah merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang – undangan dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah .
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi vertikal agar bersinergis;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja kecamatan.
- i. Pelaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dan
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk

memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya

Dengan mengacu pada visi dan misi Kecamatan Palaran serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam RENSTRA Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026 ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Palaran yaitu:

- 1. Terciptanya Pelayanan Yang Akuntabel**
- 2. Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Palaran. dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai Kecamatan Palaran yaitu :

- 1. Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan**
- 2. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD**

Dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dari tabel 3.1. berikut :

**Tabel 3.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Palaran**

<b>Visi</b> : Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban			
<b>Misi</b> : Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan member ruang bagi partisipasi masyarakat;			
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>
1.	Meningkatnya Pelayanan Yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat
			Persentase Usulan Kegiatan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang di Setujui
2.	Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran strategis dan indikator Kinerja Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2. berikut :

*Tabel 3.2*  
*Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja*  
*Tahun 2024*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,31
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Palaran	Persen	83%

### 3.4. Indikator Kinerja Kecamatan Palaran

Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palaran adalah :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah dengan Nilai **Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 88,31.**

**Formulasi : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat**

2. Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan, **Indikator Kinerja Utama Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Palaran dengan target 83%.**

**Formulasi : Jumlah Kelurahan Yang Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat / Total Jumlah Kelurahan di wilayah Kecamatan Palaran x 100**

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palaran disajikan tabel di bawah ini :

**Tabel 3.3.  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palaran Tahun 2024**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
					ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	IKM	88,31	Nilai	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 28 Tahun 2018	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Diukur melalui 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan, di antaranya : 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya / Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Palaran	83	Persen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023	Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Dibagi Total Jumlah Kelurahan yang Ada di Wilayah Kecamatan Palaran Dikali 100	Kecamatan dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) Meliputi Bidang yang di antaranya : 1. Infrastruktur 2. Ekonomi 3. Sosial Budaya 4. Kesehatan 5. Pendidikan 6. Kepemudaan

## BAB IV

### PENUTUP

Setiap Perangkat Daerah harus dapat menetapkan rumusan kinerja yang ingin dicapainya. Kinerja yang telah direncanakan tersebut harus bersifat terukur pencapaiannya. Untuk itu setiap Perangkat Daerah juga harus menetapkan indikator kinerja tertentu untuk mengukur pencapaian kerjanya. Yang jauh lebih penting, indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Jadi informasi kinerja ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran. Rumusan indikator kinerja beserta targetnya selanjutnya juga harus dinyatakan di dalam dokumen perencanaan termasuk Renja-PD dan RKA-PD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palaran merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Kecamatan Palaran. Indikator Kinerja Utama juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa

mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Palaran sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa akan datang.



Samarinda, 10 Januari 2024

Camat Palaran

Jamal Yanto, S.Sos., M.Si.

Nip. 196601271986091001



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN PALARAN**

Jl. Ampera RT. 46, Samarinda 75243, Laman : [kec-palaran.samarindakota.go.id](http://kec-palaran.samarindakota.go.id)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN PALARAN  
TAHUN 2024**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
					ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	IKM	88,31	Nilai	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 28 Tahun 2018	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Diukur melalui 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan, di antaranya : 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya / Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Palaran	83	Persen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023	Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Dibagi Total Jumlah Kelurahan yang Ada di Wilayah Kecamatan Palaran Dikali 100	Kecamatan dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) Meliputi Bidang yang di antaranya : 1. Infrastruktur 2. Ekonomi 3. Sosial Budaya 4. Kesehatan 5. Pendidikan 6. Kepemudaan

Samarinda, 02 Januari 2024  
  
**Jamalyanto, S.Sos., M.Si.**  
 NIP. 196601271986121001